

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Abdurrahman, *Masalah Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Pembebasan Tanah Di Indonesia*, PT.Citra Abadi Bakti, Bandung, 1991.
- Achmad Rubaie, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Bayumedia, Malang, 2007.
- Adrin Sutedi, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia, Indonesia, 2005
- Aries.S.Hutagalung, *Seputar Masalah Pertanahan*, LPH, Jakarta, 2005.
- A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan, Kritik, dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Bernhad Limbong, *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Jakarta, Pustaka Margaretha, 2011.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2008.
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Dudu Duswara, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Refika Aditama, Bandung, 2001.
- Djoni Sumardi Gozali, *Hukum Pengadaan Tanah Asas Kesepakatan dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum*, UII Press, Yogyakarta, 2018.
- Hasni, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*, Jakarta, Rajawali Pers, 2008.
- Hans Kalsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Bandung, 2006.
- H.M. Arba, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.

- Ida Nurlinda, *Prinsip-Prinsip Pembaharuan Agraria Perspektif Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- I Wayan Suandra, *Hukum Pertanahan Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- John Salindeho, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999.
- Maria S.W Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan, Antara Regulasi & Implementasi*, Kompas, Jakarta, 2001.
- Maria S.W.Sumarjono, *Tanah Dalam Prefektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Bukum Kompas, Jakarta, 2008.
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1976.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, PT. Alumni. Bandung, 2006.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT.Alumni, Bandung, 2009.
- Mudakir Iskandar, *Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum*, Permata Aksara, Jakarta, 2015.
- Nurus Zaman, *Politik Hukum Pengadaan Tanah Antara Kepentingan Umum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*, Refika Aditama, Bandung, 2016.
- Oloan Sitorus dan Dayat Limbong, *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Mitra Kebijakan Pertanahan Indonesia, Yogyakarta, 2004
- R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, CV. Rajawali, Jakarta, 1990.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1991.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Sartija, *Masalah Pelaksanaan Urusan Pertanahan dalam Era Otonomi Daerah (Keppres No.34 Tahun 2003)*, Tugu Jogja, Yogyakarta, 2005.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Ilmu Negara, Hukum dan Politik*, Eresco, Jakarta, 1991.

B. Sumber Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Perpres Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

C. Sumber Lain

Arimbi HP dan Emmy Hafild, *Membumikan Mandat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945*, <http://sangperempuan.blogspot.com/2011/12/membumikan-mandat-pasal-33-uud-45.html> , diakses pada Maret 2020.

<https://belajartani.com/penyebab-tanah-menjadi-tidak-produktif-dan-cara-memulihkannya/#:~:text=Perbuatan%20manusia%20yang%20menyebabkan%20tanah,terus%20menerus%20tanpa%20adanya%20perbaikan> . Diakses pada Juli 2020

<https://bplawyers.co.id/2017/08/28/benarkah-perusahaan-bertanggung-jawab-atas-semua-kesalahan-pekerjanya/>, diakses pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020.

<https://kamus.tokopedia.com/p/pembebasan-tanah/>, diakses pada Maret 2020.

<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/08/perbedaan-hukum-agraria-dan-hukum-tanah/>, diakses Juli 2020.

<https://rimbakita.com/tanah-subur-dan-tidak-subur/> diakses pada Juli 2020.

<http://tommywenno.blogspot.com/2013/09/kesuburan-tanah-dan-produktivitas-tanah.html> diakses pada Juli 2020.

<https://www.atrbpn.go.id/?menu=sekilas>. Diakses pada Oktober 2020.

<http://www.berdikarionline.com/makna-%E2%80%9Cdikuasai-oleh-negara%E2%80%9D-dalam-pasal-33-uud-1945/>, diakses pada Maret 2020.

<https://www.kompasiana.com/putrawiwoho/55f78a25dd22bd2f05bf5a88/wujudkan-ketahanan-pangan-2-lahan-non-produktif-dan-ketahanan-pangan?page=all#> diakses pada Juli 2020.

<https://www.negarahukum.com/hukum/prinsip-prinsip-pengadaan-tanah-untuk-kepentingan-umum.html>, diakses pada Maret 2020

<https://www.negarahukum.com/hukum/prinsip-prinsip-pengadaan-tanah-untuk-kepentingan-umum.html>, diakses Juli 2020.

Dini Panca Wardani, 2017, Pertanggungjawaban Perdata Pemerintah Daerah, Jurnal Rectidee, Vo. 12, No.2.

Andriawan Kusuma, 2019, Ganti Rugi Tanah Sisa pada Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar; Akibat Hukum dan Konflik Pertanahan, Vo 3, No 1.